

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,
PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ekonomi**

Disusun Oleh :

**JUANITA FATMALA
C1C010071**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2014**

**Skripsi Oleh Juanita Fatinala ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

Bengkulu, 5 Maret 2014

Pembimbing


Baihaqi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19700603 199903 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Radli, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19730203 199802 1 001

Skripsi Oleh Juanita Fatmala ini

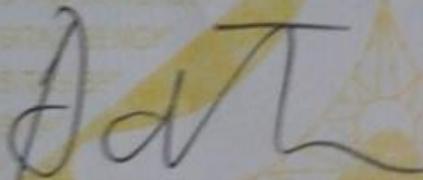
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada

Hari, Rabu 5 Maret 2014

Bengkulu, 5 Maret 2014

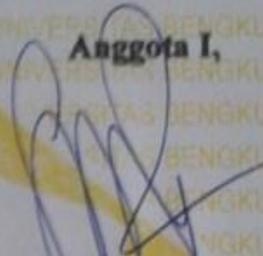
Dewan Penguji:

Ketua,



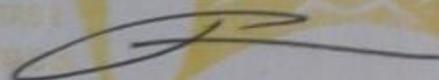
Baihagi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19700603 199903 1 001

Anggota I,



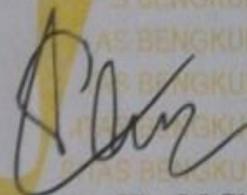
Lia Martiah NP, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19741120 200003 2 001

Anggota II,



Robinson, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19760308 200003 1 003

Anggota III,



Isma Coryanata, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19740306 199903 2 001

Mengetahui,

dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Fahrudin J.S Pareke, SE., M.Si
NIP. 19710914 199903 1 004

MOTTO

**Anda bisa sukses luar biasa dengan cepat bila Anda membantu orang lain
untuk juga merasakan sukses.**

~ Juanita Fatmala~

**Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba sesuatu
yang tidak mungkin, anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang
mungkin anda capai.**

~ Mario Teguh ~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- * Kedua orang tuaku tercinta, Papa (Jonizar Aksa) dan Mama (Maryati), yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, doa, dukungan, perhatian dan limpahan kasih sayang.**
- * Ayuk ku Zarlita Marfasari dan Adek ku tersayang yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- * Pungki Tri Saputra (My Pung-pung) yang selalu mendampingi dan memberikan semangat.**
- * Sahabat-sahabatku tersayang (VANITIA)**
- * Keluarga Besar Tercinta.**
- * Almameterku dan agamaku**

SPECIAL THANKS TO

- * Allah .SWT yang selalu memberikan kekuatan dalam menjalankan semuanya
- * Papa (Jonizar Aksa) dan Mama (Maryati) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- * Ayuk (Zarlita Marfasari) dan Adek (Janni Mellian Fitri) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
- * Dosen Pembimbingku yang terhebat Baihaqi, SE., M.Si., Ak., CA yang sangat sabar, yang tidak pernah lelah dan mengeluh dalam membimbingku untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan dorongan dan keyakinan serta nasehat yang sangat berharga dalam menjalani hidup ini.
- * Dosen Penguji ku, Ibu Lisa Martiah NP, SE., MSi., Ak., CA, Pak Robinson SE., MSi., Ak., CA, Ibu Isma Coryanata, SE., MSi., Ak., CA yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik serta motivasi yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
- * Seseorang yang selalu spesial di hatiku Pungki Tri Saputra (My Pung-pung) yang selalu setia mendampingi dan tidak henti-hentinya mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- * Untuk sahabatku Vani Januarti, Tia Lestari, Tia Prissilia yang selalu berada di sampingku disaat senang dan susah selama perkuliahan, menjadi keluarga dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- * Pak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, selaku Kepala Jurusan, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi dan masukan selama di kampus.
- * Ibu Nila Aprila, SE., M.Si., Ak CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing selama menempuh studi di Universitas Bengkulu.
- * Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Gedung K, Terima kasih Atas yang telah bapak ibu berikan yaitu ilmu, nasehat, semangat dan motivasi yang tulus yang tak mengenal rasa lelah.
- * Makasih buat genk kepompong vani, tayek, tia dan ancur.
- * Nurcahya Ayu Sukmawardani terima kasih atas pertemanan yang hebat selama perkuliahan.
- * Terima Kasih buat Om Nasir dan Tante Ya yang selalu memberikan dukungan dan doa.
- * Om dan Tanteku H. Iwan Aksa (Alm), Aina (itam), Mardalena (Uti), Julyadi (Etek), Marlin (Bungsu), Hambali (Abang), Kartini (Bunda), dan Rasidin (Pak e) yang telah memberikan dukungan dan doa.
- * Mama (Rohayawati) dan Bapak (Ishak Pudir) yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian serta doanya selama ini.
- * Teman-teman Akun Enjoy yang selama perkuliahan selalu menemani.
- * Teman-teman Akuntansi 2010 yang tidak bisa disebut satu-persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.
- * Serta terima kasih seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 5 Maret 2014 adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat secara keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 5 Maret 2014
Yang membuat pernyataan



Juanita Fatmala
NPM. C1C010013

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Oleh

Juanita Fatmala¹⁾
Baihaqi²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu kuisisioner dengan menggunakan teknik sensus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini adalah 1). Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2). Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3). Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Peraturan Perundangan.

¹⁾Calon Sarjana Ekonomi (Akuntansi) Universitas Bengkulu

²⁾ Dosen Pembimbing

**THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION LOCAL GOVERNMENT
ACCOUNTING SYSTEM, THE UNDERSTANDING OF ACCOUNTING,
THE ADHERENCE OF THE LAW REGULATION ON THE
PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT
INSTITUTION**

Oleh

**Juanita Fatmala¹⁾
Baihaqi²⁾**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementation local government accounting system, the understanding of accounting, and the adherence of the law regulation on the performance accountability of government institution. Population and sample in this study was SKPD the district central Bengkulu. Collecting data using primary data collection, the questionnaires by using sensus technique. This study used multiple linier regression analysis techniques.

The results of this study were 1). Implementation of local government accounting system positive effect on the performance accountability government institution. 2). Understanding of accounting has a positive effect on the performance accountability government institution. 3). The adherence of the law regulation positive effect on the performance accountability government institution.

Keywords: performance accountability of public institution, implementation local government accounting system, the understanding of accounting, the adherence of the law regulation.

¹⁾Candidates for Bachelor of Economics (Accounting) University of Bengkulu

²⁾Supervisor

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ”.

Peyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
2. Bapak Baihaqi, SE.,M.Si.,Ak,CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Baihaqi,SE,M.Si.,Ak,CA., Ibu Lisa Martiah NP, SE,.M.Si.,Ak,CA, Bapak Robinson,SE, M.Si., Ak,CA dan Ibu Isma Corryanata,SE. M.Si., Ak, CA selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi, dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr.Fadli, SE, M.Si., Ak, selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan pelajaran hidup yang berarti.

5. Ibu Nila Aprila SE,.M.Si.Ak,CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menjalankan proses belajar di Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu.
6. Bapak Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
7. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Ak selaku Rektor Universitas Bengkulu.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Dosen Jurusan akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2010.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan perbaikan-perbaikan dimasa akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selajutnya.

Bengkulu, 26 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Masalah	8

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10
2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10
2.1.1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
2.1.1.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12
2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	14
2.1.3 Pemahaman Akuntansi	17
2.1.4 Ketaatan pada Peraturan Perundangan.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Pengembangan Hipotesis	24
2.3.1 Hubungan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	24
2.3.2 Hubungan Pemahaman Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	25
2.3.2 Hubungan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	26
2.4 Kerangka Teoritis	27

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	28
3.2.1	Variabel Dependen.....	28
3.2.2	Variabel Indepen.....	29
3.2.2.1	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	29
3.2.2.2	Pemahaman Akuntansi	30
3.2.2.3	Ketaatan pada Peraturan Perundangan	31
3.3	Populasi dan Sampel.....	32
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Metode Analisis Data.....	32
3.5.1	Uji Kualitas Data.....	33
3.5.1.1	Uji Validitas	33
3.5.1.2	Uji Reliabilitas.....	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.5.2.1	Uji Normalitas	34
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas.....	34
3.5.2.3	Uji Heterokedastisitas	34
3.5.3	Uji Hipotesis	35
3.5.3.1	Uji F.....	35
3.5.3.2	Uji t.....	36
3.5.3.3	Koefisien Determinasi	36

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Deskriptif Data.....	37
4.1.2	Deskripsi Responden.....	38
4.1.3	Statistik Deskriptif	40
4.1.4	Hasil Uji Kualitas Data.....	43
4.1.4.1	Uji Reliabilitas.....	43
4.1.4.2	Uji Validitas	44
4.1.5	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.1.5.1	Uji Normalitas	45
4.1.5.2	Uji Multikolinearitas.....	46
4.1.5.3	Uji Heteroskedastisitas	47
4.1.5	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	48
4.1.5.1	Hasil Uji F.....	49
4.1.5.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi	49
4.1.6	Hasil Uji Hipotesis	50
4.2	Pembahasan	52
4.2.1	Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	52
4.2.2	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	53

4.2.3 Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	54
---	----

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Implikasi Penelitian	58
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.4 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13
Gambar 2.2 Kerangka Peemikiran.....	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	37
Tabel 4.2 Deskriptif Responden	38
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.4 Frekuensi	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Skor Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Lampiran 3 Tabulasi Data Pemahaman Akuntansi
- Lampiran 4 Tabulasi Data Ketaatan pada Peraturan Perundangan
- Lampiran 5 Tabulasi Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lampiran 6 Statistik Deskriptif
- Lampiran 7 Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Lampiran 8 Uji Validitas Pemahaman Akuntansi
- Lampiran 9 Uji Validitas Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
- Lampiran 10 Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lampiran 11 Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Lampiran 12 Uji Reliabilitas Pemahaman Akuntansi
- Lampiran 13 Uji Reliabilitas Ketaatan Pada Peraturan Perundangn
- Lampiran 14 Uji Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lampiran 15 Uji Normalitas Data
- Lampiran 16 Uji Multikolinearitas
- Lampiran 17 Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 18 Uji Hipotesis
- Lampiran 19 Nama-nama SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efesien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di lingkungan pemerintahan, penyerahan kewenangan dari manajemen puncak kepada para manajer level lebih rendah dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Menurut Mardiasmo (2002) dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat,

kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi

negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* (LAN dan BPKP, 2000 : 1). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry menjadi double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasmo:2006).

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundangan yang telah berlaku (Riantiarno & Azlina, 2011).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suamiati (2012) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan,

dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD kota Siak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sumiati (2012) terletak pada objek penelitian dan variabel penelitian. Objek penelitian Sumiati (2012) adalah SKPD kota Siak sedangkan penelitian menggunakan objek penelitian SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada penelitian Suamiati (2012) menggunakan variabel akuntabilitas keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pemahaman akuntansi. Penggunaan variabel pemahaman akuntansi pada penelitian ini untuk melihat seberapa tinggi tingkat pemahaman para aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah 3 tahun berturut-turut. Tidak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan. Walaupun LKPD kabupaten Bengkulu Tengah telah memperoleh opini WTP, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu pengendalian atas pencatatan dan pelaporan asset tetap belum memadai (Bengkulu Ekspres : 13/06/2013). Alasan dilakukan penelitian pada pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah adalah karena Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten baru yang terdapat di Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten ini menjadi sering menjadi sorotan masyarakat.

Berdasarkan hasil uraian diatas dalam latar belakang permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
- 2) Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
- 3) Apakah ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
- 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
- 3) Untuk menguji secara empiris pengaruh Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

a) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b) Aspek Praktis

Manfaat yang diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah dalam mencapai akuntabilitas instansi pemerintah.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Pemahaman akuntansi dilihat dari prosedur Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang lebih dikhususkan pada lingkup proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah pada instansi/kantor/badan bagian pengelola keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 3) Ketaatan pada peraturan perundangan yang dimaksud ialah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

4) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibatasi pada seberapa kompetennya staf/pegawai tersebut dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di pemerintahan daerah khususnya pada instansi/badan /kantor/dinas di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

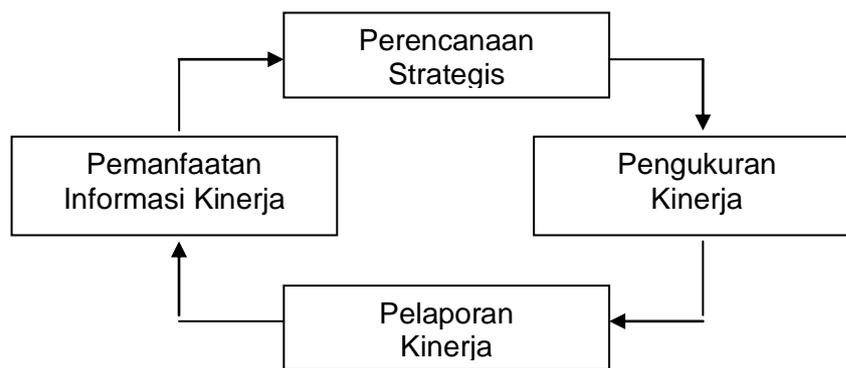
Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.1.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

Gambar 2.1
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran

kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antarap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro Negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola akuntansi bisnisnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan RI.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu:

a. Basis Kas

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: $Aset = Utang + Ekuitas\ Dana$. Setiap transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

SAPD terdiri dari 2 subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintah akuntansi Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara (Nordiawan : 2008)

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas

g) Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.3 Pemahaman Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia paham diartikan sebagai pengetahuan, pendapat, aliran haluan, pandangan, dari seorang individu terhadap sesuatu, sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami, atau cara memahami diri seorang individu terhadap sesuatu hal. Pemahaman individu itu sendiri dapat diukur dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu objek misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas keseharian mereka, sehingga akan didapatkan suatu jawaban mengenai pemahaman dari seseorang terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan pengertian mengenai pemahaman, yaitu sebuah kemampuan dari seseorang untuk menerima, mengerjakan, serta mengevaluasi suatu hal. Sedangkan pemahaman informasi adalah suatu kemampuan dari seseorang dalam menerima, mengolah suatu informasi kemudian menyusun informasi-informasi tersebut menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Pemahaman aparat pemerintah diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang pegawai/karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adanya pemahaman aparat pemerintah adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi, dimana jika pegawai mampu untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan mengerti dengan sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka laporan yang disusun dan disajikan akan sesuai dengan standar, akan berkualitas, dan relevan untuk pengambilan keputusan.

2.1.4 Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan

Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dengan pengembangan tujuan laporan keuangan dan diakhiri dengan penurunan kerangka kerja konseptual atau konstitusi untuk digunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi (Riahi dan Belkaoui, 2006). Menurut Riahi dan Belkaoui (2006), merujuk kerangka konseptual pada *financial accounting standards boards* (FASB), sejauh ini merupakan proyek yang paling menonjol dan penciptaan konstitusi akuntansi. Konstitusi ini harus memperoleh penerimaan umum, menunjukkan perilaku kolektif dan melindungi kepentingan publik dalam area yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common*

Law. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk di dalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Salah satu reformasi dalam manajemen keuangan pemerintah adalah dalam bidang penganggaran yaitu ditetapkannya anggaran kinerja sebagai basis penganggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 14 yang menyatakan bahwa rencana kerja pemerintah disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 pasal 8 yang menyatakan APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Fungsi pemerintah yang menjadi subjek pengukuran kinerja harus dikaitkan dengan anggaran, karena itu klasifikasi anggaran harus berdasarkan fungsi-fungsi

pemerintah. PP Nomor 105 tahun 2000 pasal 15 menyatakan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, sedang UU Nomor 17/2003 pasal 15 dan 16 menyatakan klasifikasi anggaran menggunakan klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan harus selaras dengan sistem anggaran pemerintah. Oleh sebab itu klasifikasi anggaran dalam standar akuntansi pemerintah haruslah sama dengan klasifikasi sistem penganggaran. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah haruslah sejalan (klasifikasi anggaran) dengan penganggaran dan standar akuntansi pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terkait dengan kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan, beberapa diantaranya ialah:

Oktriandra S (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Dumai menemukan bukti secara empiris bahwa kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

Zirman (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja,

Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

Riantiarno & Azlina (2011) dengan judul penelitian "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah". Hasil penelitian Riantiarno & Azlina (2011) membuktikan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Sumiati (2012) melakukan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), akuntabilitas keuangan, ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Sumiati (2012) menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Secara parsial penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan akuntabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Robbyta (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Hasil penelitian membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sitem pelaporan dan Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Oktrianda (2005)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> - Independen: Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan - Dependen: Akuntabilitas Kinerja 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
2.	Zirman (2010)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Independen: Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

			Dependen: akuntabilitas kinerja	
3.	Riantiarno & Azlina (2011)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Independen: penerapan akuntabilitas keuangan, ketaatan peraturan perundangan - Dependen: akuntabilitas kinerja 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan ketaatan peraturan perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
4.	Sumiati (2012)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Independen: penerapan sistem akuntansi daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan peraturan perundangan - Dependen: akuntabilitas kinerja 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan penerapan sistem akuntansi daerah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
5.	Robbyta (2012)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan - Dependen: akuntabilitas kinerja 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sistem pelaporan dan Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas

Kinerja

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan oleh

Sumiati (2012) yang berhasil membuktikan bahwa secara simultan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₁ : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

2.3.2 Hubungan Pemahaman Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja

Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan bertujuan agar suatu instansi tertib administrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah menetapkan peraturan kepada daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sehingga nantinya dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar tersebut dapat menghasilkan suatu data keuangan yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada suatu tingkat SKPD dan tingkat pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan seksama karena pelaksanaan ini bertanggungjawab atas tersedianya informasi akuntansi di tingkat SKPD dan tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya standarisasi tersebut memungkinkan akan adanya perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Apriyani (2012) dan Nugroho

(2013) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₂ : Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

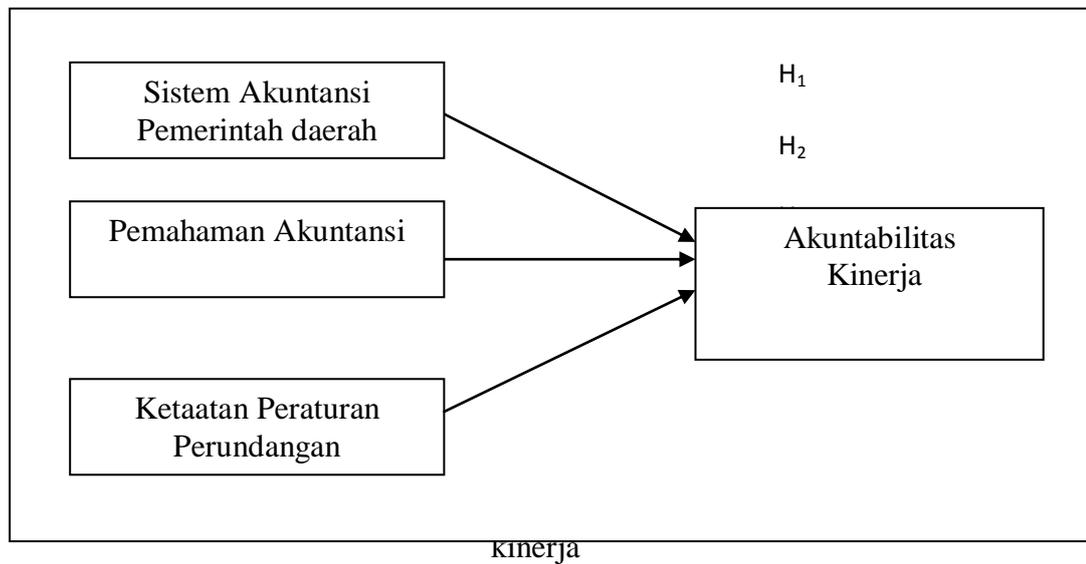
2.3.3 Hubungan Ketaatan Peraturan Perundangan dan Akuntabilitas Kinerja

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *civil law* atau *common law*. Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor public dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Dalam penelitiannya, Soleman (2007), Sumiati (2012), dan Robbyta (2013) membuktikan bahwa ketaataan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃ : Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja

2.4 Kerangka Teoritis



Berdasarkan kerangka teoritis yang diilustrasikan pada gambar 2.2 dapat diuraikan bahwa dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah menguji apakah sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) dan variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2012).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini variabel dependennya adalah akuntabilitas kinerja. Sedangkan variabel independennya sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan peraturan perundangan.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran periodik (Inpres No. 7/1999).

Variabel AKIP diukur dengan instrumen 10 butir pernyataan yang sebelumnya sudah digunakan Sumiati (2012) dengan 4 indikator yaitu penetapan

perencanaan stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel dependen adalah kuesioener yang dikembangkan dari peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan peraturan perundangan.

3.2.2.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Variabel SAPD diukur dengan 7 butir pertanyaan yang sebelumnya sudah digunakan Sumiati (2012) dengan 3 indikator yaitu pencatatan, penggolongan, dan pelaporan. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah kuesioenr yang dikembangkan dari peneliti – peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.2.2.2 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi ialah pemahaman dalam penyusunan keuangan daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi pemerintah Daerah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan dan dan memenuhi prinsip-prinsip dalam penyajian laporan keuangan. Variable ini mengukur sejauh mana pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mampu mengkoordinasikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Variabel Pemahaman Akuntansi diukur dengan 10 butir pertanyaan yang sebelumnya sudah digunakan Famela (2009) dengan indikator yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti – peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.2.2.3 Ketaatan Peraturan Perundangan

Ketaatan peraturan perundangan mengacu dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan.

Sistem hukum yang berlaku di suatu Negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah Negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan – aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan procedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan – badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Variabel Ketatan Peraturan Perundangan diukur dengan 5 butir pertanyaan yang telah digunakan dalam penelitian Sumiati (2012) diukur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya ketataan peraturan perundangan dan skor (5) menunjukkan tingginya ketaatan peraturan perundangan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu seluruh SKPD dijadikan sampel tanpa terkecuali. Sumber data dari penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah yang meliputi : Bendahara, PPK atau PPTK yang mewakili masing-masing SKPD.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey yang dilakukan pada SKPD yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pertanyaan yang disebut kuesioner yang disebar langsung ke pegawai SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah bagian pengelola keuangan. Media kuesioner akan memberikan beberapa pilihan jawaban alternatif yang sesuai dengan proporsi dari masing-masing pernyataan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih dapat diinterpretasikan. Data yang dihimpun dari hasil penelitian di lapangan, akan penulis bandingkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif.

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada table *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji reabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas

dinyatakan *reliable* jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika $(r_i) > 0,6$. (Ghozali, 2011)

3.5.1.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Corelation*, data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0,05 (Ghozali,2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu *Kolmogrov–Smirnov test* dengan kriteria pengujian α 0,05 sebagai berikut:

- a. Jika $sig \geq \alpha$ berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal
- b. Jika $sig \leq \alpha$ berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Asumsi ini menyatakan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala korelasi. Menurut Ghozali (2011) pengujian Multikolinieritasakan menggunakan *Variance Inflationfactor* (VIF) dengan kriteria yaitu:

- a. Jika angka *tolerance* dibawah 0,10 dan $VIF > 10$ dikatakan terdapat gejala multikolinieritas
- b. Jika angka *tolerance* diatas angka 0,10 dan $VIF < 10$ dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Glejser Test*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $sig > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011).

3.5.3 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*). Uji hipotesis tersebut dilakukan dengan *software* SPSS 16 karena mampu menghasilkan output yang meyakinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dimana :

Y	= Akuntabilitas kinerja
α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
X₁	= Sistem akuntansi pemerintah daerah
X₂	= Pemahaman akuntansi
X₃	= Ketaatan peraturan perundangan
ε	= standar error

3.5.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011)

3.5.3.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011)

3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Nilai $AdjustedR^2$ ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($AdjustedR^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $AdjustedR^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $AdjustedR^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. (Ghozali, 2011)